

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

David Bartram dalam jurnalnya cenderung berpendapat untuk menerapkan *open-border migration*, karena migrasi merupakan kebebasan manusia sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupannya. Namun ia tidak memerhatikan sisi negatif dari fenomena transnasional tersebut (Bartram, 2010). Sedangkan dalam penelitian ini, akan lebih berfokus pada efek negatif dari migrasi, salah satunya perdagangan manusia.

Berbeda halnya dengan Miller dan Baumister, di mana mereka berpendapat bahwa negara sebagai aktor berdaulat harus melakukan kontrol perbatasan yang ketat guna melindungi migran (Miller & Baumeister, 2013). Namun jurnal ini memang tidak membahas mengenai proyek ekonomi *Greater Mekong Subregion*, itulah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Studi kasus di regional Schengen yang bersifat *borderless* menunjukkan tingkat perdagangan manusia relatif sama, sehingga kebijakan secara regional bisa diterapkan, namun tidak di kawasan lain yang tidak menerapkan *borderless* (DiRienzo & Das, 2017). Sebab itu, meski Asia Tenggara terkenal sebagai daerah transit, sumber penting, dan asal dari orang-orang yang diperdagangkan (dan sub-kawasan yang membentuk *Greater Mekong Subregion*, semuanya dikenal sebagai daerah perdagangan manusia utama di Asia Tenggara), tingkat perdagangan manusia akan berbeda di mana satu negara akan menjadi destinasi *major* di antara negara lainnya.

Menurut Danielle Tan, proyek ekonomi GMS adalah bentuk integrasi yang lebih berkembang dari “integrasi longgar” yang ada di Asia. Meski begitu, ia juga menyoroti adanya ketimpangan yang terjadi di GMS karena perbedaan kemampuan pengaturan pemerintah negara GMS (Tan, 2014). Namun, jurnal tersebut tidak membahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut seperti migrasi, perdagangan manusia, penyebaran penyakit, dll. Karena itu, dampak negatif berupa perdagangan manusia akan dibahas dalam penelitian ini.

Bonanno dalam tulisannya menyatakan betapa pentingnya suatu perbatasan dan *concern* tentang kegiatan kompleks apa saja yang terjadi di sekitarnya di kawasan *Greater Mekong Subregion* (Bonanno, 2012). Akan tetapi, jika berangkat dari proyek ekonomi yang sedang dijalankan di mana pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan barang dan manusia, nampaknya hal ini akan bersinggungan. Jurnal tersebut memuat studi kasus perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Myanmar – Thailand dan di Delta Mekong Vietnam. Dalam penelitian ini akan ditambahkan mengenai upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia.

Salah satu alasan mengapa para migran rentan terhadap *trafficking* adalah karena kurang kuatnya instrument hukum yang melindungi mereka. Sarāwut Phaithūnwong dalam penelitiannya menyebutkan bahwa regulasi kebijakan migrasi di Thailand sendiri tidak konsisten, *pro-employer*, dan kurang efektifnya hukum perlindungan pada tenaga kerja migran (Sarāwut Phaithūnwong & Yongyuth Chalamwong, 2012). Meski begitu memang pada dasarnya perdagangan manusia merupakan tantangan de-teritorial (Molland, 2012). Sehingga, permasalahan ini

tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri dengan pengkotak-kotakan mengandalkan satu regulasi yang berlaku di suatu negara saja.

Sarāwut dan Yongyuth dalam penelitiannya lebih membahas mengenai regulasi nasional yang diterapkan di Thailand, tanpa melibatkan instrument secara multilateral. Dalam penelitian ini, penulis akan membawa MoU dari *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT). Begitu juga dengan penelitian Molland di mana fokusnya adalah regulasi pemerintah dan wilayah dari Lao PDR, hal yang menjadi sebuah perbedaan adalah penulis akan lebih berfokus pada Thailand sebagai negara destinasi dan mengaitkannya dengan COMMIT.

Tantangan perdagangan manusia bukan hanya tentang *state vs* aktor non-tradisional (*trafficker*), namun juga dengan para penegak hukum itu sendiri. Ullah dan Hossain, melalui penelitian yang melibatkan koresponden migran dari negara-negara GMS dan Indonesia menyoroiti bahwa perdagangan manusia, untuk memasuki Thailand dilakukan dengan sepengetahuan dan keterlibatan penjaga perbatasan dan polisi (Ullah & Hossain, 2011). Namun begitu, tidak serta merta dapat diambil kesimpulan bahwa petugas perbatasan tidak berguna. Justru, negara perlu lebih memperketat perbatasan dan melakukan *training* petugasnya dengan lebih selektif. Meski berbicara di kawasan GMS, jurnal ini tidak menyinggung mengenai proyek ekonomi GMS, oleh karena itu penulis akan membahas GMS sebagai proyek yang menimbulkan dampak pada perdagangan manusia.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	International Migration, Open Borders Debates, and Happiness	David Bartram	Anggapan bahwa manusia bermigrasi ke negara yang lebih kaya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini karena faktor ekonomi.	Jurnal tersebut cenderung berfokus pada migrasi sebagai hak setiap orang untuk mencapai <i>wealth</i> , namun tidak memerhatikan sisi negatifnya. Sedangkan, skripsi ini akan berfokus pada efek negatif yang terjadi dari fenomena migrasi, khususnya perdagangan manusia.
2.	Managing Migration: Is border control fundamental to anti-trafficking and anti-smuggling interventions?	Rebecca Miller dan Sebastian Baumeister	Globalisasi menyebabkan batas antar negara menjadi semu, bahkan hilang sehingga menimbulkan fenomena transnasional, salah satunya adalah migrasi.	Tidak membahas mengenai proyek ekonomi GMS di mana pembangunan infrastruktur di sub-kawasan ini memang dimaksudkan agar <i>supply chain</i> dan manusia bergerak lebih mudah.
3.	Human Trafficking and Country Borders	Cassandra E. DiRienzo dan Jayoti Das	Adanya pelemahan perbatasan, mendorong migran yang didasarkan oleh ekonomi (faktor pendorong); dan wilayah yang	Jurnal tersebut membahas regional Schengen di Eropa. Sedangkan, skripsi ini akan membahas sub-kawasan di wilayah Asia Tenggara, yaitu

			terkaya (faktor penarik).	<i>Greater Mekong Subregion.</i>
4.	The Greater Mekong Subregion programme: reflections for a renewed paradigm of regionalism	Danielle Tan	Tiga koridor ekonomi GMS membawa percepatan ekonomi bagi beberapa negara, namun menimbulkan kesenjangan dan juga perubahan sosial.	Dalam jurnal ini tidak terlalu disinggung mengenai dampak dari kesenjangan ekonomi antar negara terhadap permasalahan sosial.
5.	Development Dynamics in the Greater Mekong Sub-Region – Trans-Boundary Routes of Human Insecurity –	Gianluca Bonanno	Selain faktor ekonomi, adanya ketidakstabilan politik dalam negeri juga mendorong orang-orang, khususnya dari Myanmar untuk bermigrasi ke Thailand.	Jurnal tersebut memuat studi kasus perdagangan manusia ke Thailand dan Delta Mekong, Vietnam. Skripsi ini akan menambahkan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia.
6.	Managing International Labor Migration in ASEAN: a Case of Thailand	Sarāwut Phaithūnwong dan Yongyuth Chalamwong	Disebutkan bahwa mayoritas migran dari Kamboja, Lao PDR, dan Myanmar menduduki pekerjaan <i>low-skill</i> dan kebanyakan dari mereka illegal.	Penelitian ini lebih membahas regulasi nasional. Sedangkan dalam skripsi akan melibatkan instrument secara multilateral, yaitu MoU COMMIT.

7.	The Inexorable Quest for Trafficking Hotspots Along the Thai–Lao Border	Sverre Molland	Lao-PDR sebagai negara miskin, menyebabkan warganya terutama yang berada di perbatasan untuk bermigrasi ke Thailand karena faktor ekonomi dan banyak dari mereka terlibat kasus perdagangan manusia berupa <i>sex trafficking</i> .	Penelitian tersebut berfokus pada regulasi pemerintah dan wilayah Lao-PDR. Skripsi ini akan lebih berfokus di wilayah Thailand sebagai <i>destination country</i> dengan mengaitkan pada COMMIT.
8.	Gendering Cross-Border Networks in the Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes to Thailand	AKM Ahsan Ullah dan Mallik Akram Hossain	Menyebutkan bahwa Asia Tenggara adalah pusat perdagangan manusia, dan Thailand sebagai salah satu negara tujuan dan sumber eksploitasi manusia.	Jurnal ini tidak menyinggung mengenai proyek GMS. Dalam skripsi ini, setidaknya akan membahas GMS sebagai proyek ekonomi yang menimbulkan dampak pada perdagangan manusia.

2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Transnasionalisme

Transnasionalisme adalah sebuah konsep penggambaran mengenai suatu proses fenomena seperti ekonomi, politik, budaya, manusia, yang melewati batas-batas dari sebuah negara. Oleh karena itu, transnasionalisme dikatakan sebagai proses yang *multi-faced*, banyak wajah, atau bermacam-macam bentuk.

Dalam buku *Comparative Urban & Community Research – Transnationalism from Below*, Luis Eduardo Guarnizo dan Michael Peter Smith menteorisasikan transnasionalisme.

“Expansion of transnational capital and mass media to even the remotest of hinterlands has provoked a spate of discourses on “globalization,” “transnationalism,” and the “crisis of the nation state.... The nation-state is seen as weakened “from above” by transnational capital, global media, and emergent supra-national political institutions. “From below” it faces the decentering “local” resistances of the informal economy, ethnic nationalism, and grassroots activism.... For some they bring market rationality and liberalism to a disorderly world “from above.” For others they generate conditions conducive to the creation of new liberatory practices and spaces “from below” like transnational migration and its attendant cultural hybridity”

Berawal dari adanya ekspansi modal transnasional dan media massa, memunculkan wacana seperti “globalisasi”, “transnasionalisme”, dan “krisis negara bangsa”. Mereka berpandangan bahwa transnasionalisme terbagi dua jalur, yaitu dari atas atau “*from above*” dan dari bawah atau “*from below*” (Peter Smith & Eduardo Guarnizo, 2017).

Dalam transnasional *from below*, perhatian utama difokuskan pada bagaimana proses transnasionalisme mempengaruhi hubungan konstruksi budaya, ekonomi, interaksi, dan organisasi sosial. Setidaknya, ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya transnasionalisme.

1. Globalisasi kapitalisme dengan dampaknya yang tidak stabil di negara-negara yang kurang terindustrialisasi (*less industrialized*);
2. Revolusi teknologi dalam sarana transportasi dan komunikasi;
3. Transformasi politik global seperti dekolonisasi dan universalisasi hak asasi manusia; dan

4. Perluasan jaringan sosial yang memfasilitasi migrasi transnasional, organisasi ekonomi, dan politik.

Fenomena migrasi adalah salah satu proses transnasional yang termasuk *from below*. Dalam buku tersebut, dipaparkan setidaknya tiga faktor yang berhubungan dengan fenomena migrasi kontemporer.

1. Mikrodinamika migrasi: *Network* dan *household*;
2. Globalisasi kapitalisme dan reorganisasi ekonomi; dan
3. Revolusi teknologi.

Strukturisasi ekonomi global dan posisi negara-negara (terutama negara-negara yang kurang terindustrialisasi) dalam perekonomian dunia, telah meningkatkan ketergantungan ekonomi, sehingga banyak negara yang mengalami migrasi masal.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Luis Eduardo Guarnizo dan Michael Peter Smith melihat fenomena migrasi transnasional disebabkan karena adanya globalisasi kapitalisme di mana hal ini akan membuat orang-orang berpindah menuju negara dengan perekonomian yang lebih maju.

Begitu pula penulis mengamati apa yang terjadi di daerah kawasan Asia Tenggara khususnya *Greater Mekong Subregion*. Proyek ekonomi GMS merupakan bentuk dari globalisasi pasar, serta dibangunnya fasilitas mobilitas yang akan mempermudah jaringan migrasi. Hal ini tentu akan membentuk sebuah fenomena transnasionalisme *from below* di kawasan negara-negara GMS, terutama yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah orang-orang menjadikan Thailand sebagai negara destinasi karena lebih maju dalam bidang ekonominya dibanding negara di sekitarnya yang *less industrialized*.

Karena permasalahan migrasi ini merupakan masalah transnasional yaitu terjadinya fenomena yang melewati batas negara dan menyebabkan suatu permasalahan, sehingga penyelesaian dilakukan di tingkat *government* atau *state* sebagai pembuat dan pemegang kebijakan. Professor Ganesan dan Amer mendefinisikan multilateralisme secara sederhana dalam buku *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism* yaitu “*Quite simply ... three or more countries coming together to deal with issues of common interest, whether they be positive or negative*” (Solingen, 2010).

Multilateralisme sering dikaitkan dengan kerangka kerja yang didasarkan pada gagasan kerja sama dan perdamaian. Sebagaimana pendapat dari Bruno Charbonneau, “multilateralisme mencakup gagasan dan visi perdamaian, kebebasan, hak asasi manusia, keamanan, demokrasi...” (Robert W. Murray, 2016).

Penulis melihat, negara berperan penting dalam merespon fenomena transnasional yang menyebabkan salah satunya perdagangan manusia di kawasan *Greater Mekong Subregion* dengan membentuk kerjasama multilateral, menyamakan pandangan bahwa fenomena itu tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing negara, melainkan mereka perlu berkolaborasi. *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* adalah bentuk multilateralisme di tingkat sub-kawasan Asia Tenggara yang berfokus pada perdagangan manusia di Sub-Kawasan Mekong Raya.

2.2.2. *Human Security*

Perhatian pada keamanan manusia lebih diperhatikan ketika berakhirnya era bipolar, di mana sebelumnya perhatian difokuskan terhadap keamanan non-tradisional yang bernuansa militeristik, kini menjadi berfokus pada ketimpangan gender, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan penyakit. Meski tidak serta merta menghapus keamanan non-tradisional sepenuhnya seperti terorisme dan konflik antar-etnis. Karena *human security* bukan hanya tentang *shifting* fenomenanya, tetapi juga objek yang menjadi perhatian untuk dilindungi. Seperti yang tertulis dalam buku *Human Security: Concept and Implication*, bahwa ‘keamanan’ dari konsepsi tradisionalnya adalah mengenai keamanan negara dari ancaman militer, yang berubah untuk berkonsentrasi pada keamanan masyarakat dan komunitas (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Barry Buzan mendefinisikan bahwa keamanan adalah suatu proses politik, di mana ketika sebuah isu dijadikan sebuah ancaman terhadap objek yang ditunjuk. Berbeda dengan King dan Murray, yang membawa definisi dari *Oxford English Dictionary* (OED), menekankan pada aspek perasaan: Kondisi terlindungi dari bahaya, aman... Kebebasan dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan; perasaan aman atau terbebas dari bahaya (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Masih dikutip dari buku yang sama, MacLean menyoroti bahwa *human security* bukan hanya menyelimuti masalah-masalah yang berhubungan dengan individu seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan, dsb... namun lebih menunjukkan perlindungan dari kekerasan tidak terstruktur yang sering menyertai dari aspek keamanan non-teritorial, seperti kekerasan yang berasal dari kelangkaan lingkungan, atau migrasi massal.

Migrasi merupakan masalah keamanan sejak pertengahan 1970-an. Dan *human trafficking* adalah bagian resiko yang tidak terpisahkan dari migrasi. Dalam pendekatan keamanan manusia, negara dibutuhkan untuk melakukan intervensi kolaboratif untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka (Yousaf, 2018). Hal ini selaras dengan Paul Evans dalam mendefinisikan *Human Security*, bahwa isu-isu keamanan manusia adalah tanggungjawab negara, kedaulatannya, dan intervensinya.

Dalam skripsi ini, penulis melihat bahwa fenomena *human trafficking* di Asia Tenggara khususnya di kawasan *Greater Mekong Subregion* dapat ditinjau melalui pendekatan *human security* yang dikemukakan oleh MacLean dan Paul Evans. Berangkat dari fenomena transnasional berupa migrasi, para migran yang datang dari negara sekitar Thailand merupakan kelompok yang rentan terhadap perdagangan manusia, mengingat migran dari negara GMS kebanyakan menduduki pekerjaan 3-D (*dirty, dangerous, difficult*) dan ilegal, peluang eksploitasi buruh sangat tinggi. Selain dari itu, permintaan terhadap *sex trafficking* juga terbilang tinggi. Artinya terdapat ancaman lain yang datang dari fenomena non-teritorial seperti dalam kasus ini adalah migrasi.

Menanggapi fenomena perdagangan manusia, keenam negara GMS menandatangani *MoU on Cooperation against Trafficking in Person in the Greater Mekong Subregion* yang akan dilanjutkan pada pembentukan *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT)*. Hal ini menandakan hadirnya bentuk kolaboratif negara sebagai aktor yang bertanggung-jawab terhadap keamanan manusia, yaitu melalui mekanisme multilateralisme.

2.2.3. Perdagangan Manusia di Thailand

Asia Tenggara adalah tempat transit, sumber, maupun tempat dari perdagangan manusia itu sendiri. Thailand merupakan sebuah negara yang menjadi destinasi utama di mana orang bermigrasi ke sini, khususnya negara-negara Asia Tenggara daratan atau *mainland* (Kaur, 2010). *Human trafficking* hadir dalam berbagai macam bentuk, namun di Thailand sendiri, mayoritas bentuknya bisa dikategorikan sebagai perdagangan seksual (*sex trafficking*), perbudakan (*slavery*), dan pengemis (*begging*). *Sex trafficking* menjadi kasus yang paling sering terjadi di antara bentuk perdagangan manusia lainnya di Thailand.

Perdagangan seks tidak serta-merta terjadi pada saat ini, sejarah membentuk apa yang terjadi pada masa sekarang. Selama perang Vietnam, anggota militer Amerika Serikat dan Perancis pergi ke Thailand untuk mencari prostitusi, sehingga permintaan untuk prostitusi dan perdagangan manusia meningkat, menyebabkan eksploitasi manusia besar-besaran di Thailand dan Vietnam (Kranrattanasuit, 2014). Hal ini pada akhirnya diikuti dengan meningkatnya pariwisata di Thailand yang berbasis 4S – *sand, sea, sun, dan sex* (Elliott, 1983).

Migran yang datang ke Thailand untuk bekerja, khususnya yang datang dari negara *Greater Mekong Subregion* merupakan kelompok yang rentan. Kelompok migran ini merupakan pekerja *low-skill* dan tidak mengisi pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Migran ilegal bukan saja hanya terjadi ketika ia melewati perbatasan, terkadang seorang migran juga membawa dokumen yang lengkap, namun ketika ia dipekerjakan, dokumen tersebut ditahan oleh ‘majikannya’ sehingga statusnya berubah menjadi ilegal dan sulit untuk mendapatkan perlindungan.

2.3. Asumsi Penelitian

Melalui penerapan *Program Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT)*, Thailand melakukan suatu upaya melalui bentuk multilateralisme dengan negara-negara sub-kawasan Mekong lainnya, dengan menyepakati *MoU on Cooperation against Trafficking in Person in the Greater Mekong Subregion* sebagai langkah negara dalam meminimalisir dan menanggulangi kasus perdagangan manusia di negaranya.

2.4. Kerangka Analisis

